Jurnal Multidisiplin West Science
Vol. 5, No. 06, Juni 2026, pp. 1026-1035

Dinamika Sosial dan Kelembagaan sebagai Penentu Keberhasilan Rehabilitasi Hutan dan Lahan: Studi Kasus Desa Momala, Kabupaten Gorontalo

Dicky Artha[1], Sitti Muti'ah Rahman[2], Safira Putri H. Malik[3], Fitryane Lihawa[4], Iswan Dunggio[5]
[1] Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo dan mutedemulana@gmail.com
[2] Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and tiarahman897@gmail.com
[3] Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and safira@ung.ac.id
[4] Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and fitryane.lihawa@ung.ac.id
[5] Magister Kependudukan dan Lingkungan Hidup, Universitas Negeri Gorontalo and iswan@ung.ac.id

ABSTRAK

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) menjadi salah satu program utama pemerintah Indonesia dalam rangka memulihkan ekosistem hutan yang mengalami kerusakan. Meskipun demikian, capaian keberhasilan program tersebut belum sepenuhnya memenuhi harapan. Penelitian ini mengkaji keterkaitan antara kondisi sosial dan kelembagaan masyarakat dengan tingkat keberhasilan pelaksanaan RHL di Desa Momala, Kabupaten Gorontalo. Pendekatan campuran (*mixed method*) diterapkan melalui kuesioner terstruktur berskala Likert 4 poin kepada 10 responden pilihan serta kuesioner Likert 5 poin kepada 39 responden yang mencakup petani peserta, aparat desa, dan pendamping lapangan. Data kualitatif dikumpulkan melalui wawancara mendalam. Temuan menunjukkan bahwa rerata skor aspek sosial mencapai 2,61 (Cukup Baik), di mana dimensi pendampingan dan monitoring memperoleh skor paling rendah (2,38; Kurang Baik), diikuti norma dan praktik sosial (2,27; Kurang Baik). Pada aspek kelembagaan, fungsi kelompok tani memiliki indeks terendah (62%; Sedang), disusul monitoring program (64%; Sedang). Temuan penelitian ini menegaskan bahwa aspek sosial dan kelembagaan di Desa Momala menjadi tantangan utama dalam pencapaian keberhasilan RHL, terutama karena belum optimalnya pendampingan pascatanam, terbatasnya peran kelompok tani, masih berlangsungnya praktik pelepasan ternak bebas dan pembakaran lahan, serta belum terbentuknya rasa memiliki yang mengakar terhadap tanaman rehabilitasi.

Kata Kunci: *Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Faktor Sosial, Kelembagaan Lokal, Indeks Kelembagaan, Desa Momala, Kabupaten Gorontalo*

ABSTRACT

Forest and Land Rehabilitation (RHL) is one of the Indonesian government's main programs to restore damaged forest ecosystems. However, the program's success has not fully met expectations. This study examines the relationship between community social and institutional conditions and the success rate of RHL implementation in Momala Village, Gorontalo Regency. A mixed-method approach was applied through a structured 4-point Likert scale questionnaire to 10 selected respondents and a 5-point Likert scale questionnaire to 39 respondents, including participating farmers, village officials, and field assistants. Qualitative data were collected through in-depth interviews. The findings showed that the average score for the social aspect reached 2.61 (Fairly Good), where the mentoring and monitoring dimension obtained the lowest score (2.38; Poor), followed by social norms and practices (2.27; Poor). In the institutional aspect, the function of farmer groups had the lowest index (62%; Fair), followed by program monitoring (64%; Fair). The findings of this study confirm that social and institutional aspects in Momala Village pose the main challenges to the success of RHL, mainly due to suboptimal post-planting mentoring, the limited role of farmer groups, persistent free-ranging livestock and land burning, and a lack of a deep-rooted sense of ownership toward the rehabilitated plants.

Keywords: *Forest and Land Rehabilitation, Social Factors, Local Institutions, Institutional Index, Momala Village, Gorontalo Regency*

PENDAHULUAN

Kerusakan ekosistem hutan di Indonesia telah mendorong pemerintah untuk meluncurkan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang bertujuan memulihkan fungsi ekologis kawasan hutan dan lahan kritis. Program ini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 tentang Rehabilitasi dan Reklamasi Hutan, yang mencakup dua kegiatan pokok berupa reboisasi di kawasan hutan serta penghijauan di lahan di luar kawasan hutan. Selama beberapa dekade terakhir, pemerintah telah mengalokasikan anggaran dan sumber daya manusia yang cukup besar untuk mendukung program ini (Indrajaya et al., 2022).

Pelaksanaan RHL di berbagai wilayah Indonesia masih menemui sejumlah kendala, mulai dari rendahnya persentase hidup tanaman, lemahnya kegiatan pemeliharaan setelah penanaman, hingga tidak optimalnya keberlanjutan pengelolaan di tingkat tapak. Kajian-kajian sebelumnya mengungkapkan bahwa penyebab rendahnya keberhasilan RHL tidak hanya terletak pada aspek teknis budidaya tanaman, melainkan juga berkaitan erat dengan aspek sosial dan kelembagaan di tingkat komunitas (Löfqvist et al., 2022; Suparwata et al., 2021). Dalam praktiknya, rehabilitasi sering menghadapi hambatan berupa perencanaan yang *top-down*, kurangnya mekanisme pendampingan yang berkelanjutan, rapuhnya institusi lokal, dan norma sosial yang belum sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan program.

Perspektif kelembagaan memberikan kerangka analisis yang relevan untuk memahami persoalan tersebut. North (1991) memaknai kelembagaan sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang membentuk pola interaksi manusia, sedangkan Ostrom (1990) menekankan bahwa pengelolaan sumber daya bersama hanya akan berhasil apabila kelembagaan lokal mampu menetapkan aturan yang jelas, memantau kepatuhan, dan menegakkan sanksi secara konsisten. Dalam konteks RHL, kelembagaan lokal meliputi kelompok tani, pemerintah desa, lembaga adat, serta norma-norma tidak tertulis yang mengatur hubungan masyarakat dengan sumber daya alam di sekitarnya.

Desa Momala di Kabupaten Gorontalo merupakan salah satu lokasi pelaksanaan RHL vegetatif pada tahun 2019 dengan cakupan lahan seluas 330 hektar. Pengamatan awal menunjukkan adanya berbagai persoalan sosial dan kelembagaan di wilayah tersebut, antara lain kebiasaan melepas ternak secara bebas di area rehabilitasi, praktik pembukaan lahan dengan cara membakar, lemahnya fungsi pengawasan oleh kelompok tani, serta minimnya pendampingan teknis setelah kegiatan penanaman. Penelitian-penelitian terdahulu di Gorontalo cenderung terfokus pada aspek partisipasi masyarakat secara umum (Bahua & Suparwata, 2018; Pakaya et al., 2025; Suparwata et al., 2021), namun belum mengintegrasikan analisis faktor sosial dan kelembagaan secara simultan dalam konteks pencapaian program RHL pada tingkat desa.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini dirancang untuk mengkaji tiga persoalan pokok. Pertama, bagaimana gambaran kondisi sosial dan kelembagaan masyarakat Desa Momala terkait pelaksanaan program RHL. Kedua, faktor sosial dan kelembagaan apa saja yang menjadi penyebab utama belum berhasilnya program RHL. Ketiga, apakah aspek sosial dan kelembagaan secara keseluruhan lebih berperan sebagai pendukung ataukah penghambat tercapainya tujuan RHL. Penelitian ini diharapkan memperkaya pemahaman akademik mengenai interaksi antara

dimensi sosial dan kelembagaan dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi hutan, sekaligus menyediakan landasan empiris bagi penyempurnaan kebijakan.

Secara konseptual, keberhasilan RHL umumnya dinilai dari persentase hidup tanaman, kondisi pertumbuhan tanaman, dan keberlanjutan pemeliharaan pada tahap pascaproyek. Indrajaya et al., (2022) menegaskan bahwa keberhasilan restorasi lanskap hutan tropis dalam jangka panjang sangat bergantung pada keterpaduan pendekatan teknis, sosial, dan kelembagaan. Dari sisi sosial, beberapa kajian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat yang bermakna bukan sekadar keterlibatan simbolis, melainkan mencakup peran aktif dari perencanaan hingga pemeliharaan mempunyai korelasi kuat dengan luaran ekologis maupun sosial dari program restorasi (Da Silva et al., 2025; Löfqvist et al., 2022).

Mekanisme insentif, baik yang bersifat finansial maupun nonfinansial, juga dianggap sebagai salah satu kunci untuk mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang (Tedesco et al., 2021). Pada aspek kelembagaan, Thapa et al., (2025) melalui tinjauan sistematisnya menemukan bahwa kelompok tani yang memiliki aturan kerja terstruktur dan didukung koordinasi yang baik dengan pihak pemerintah menghasilkan tingkat keberhasilan restorasi yang lebih tinggi. Sylviani et al., (2020) dalam studi di KPH Boalemo, Gorontalo, mengungkapkan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan pengelolaan hutan oleh komunitas.

LANDASAN TEORI

A. Konsep Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) didefinisikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2020 sebagai upaya memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan fungsi hutan dan lahan agar daya dukung, produktivitas, dan perannya dalam menjaga sistem penyangga kehidupan tetap terjaga. Program ini terdiri atas dua komponen utama, yakni reboisasi pada kawasan hutan yang gundul atau rusak, dan penghijauan pada lahan kritis di luar kawasan hutan.

Keberhasilan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan umumnya dinilai berdasarkan tingkat keberlangsungan hidup tanaman, kondisi pertumbuhan tanaman secara fisik, serta keberlanjutan pemeliharaan oleh masyarakat setelah program rehabilitasi selesai dilaksanakan. Indrajaya et al., (2022) dalam tinjauan komprehensif mengenai restorasi lanskap hutan tropis di Indonesia menegaskan bahwa keberhasilan dalam jangka panjang sangat ditentukan oleh keterpaduan antara pendekatan teknis, sosial, dan kelembagaan. Buthelezi et al., (2025) dalam tinjauan sistematisnya mengenai rehabilitasi dan restorasi hutan juga menggarisbawahi bahwa aspek sosiologis dan tata kelola memiliki pengaruh yang setara dengan aspek teknis dalam menentukan capaian rehabilitasi.

B. Faktor Sosial dalam Keberhasilan RHL

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa faktor sosial memiliki peran yang sama pentingnya dengan faktor teknis dalam menentukan keberhasilan rehabilitasi hutan. Indrajaya et al., (2022) mengidentifikasi empat akar persoalan sosial, meliputi pendekatan proyek yang bersifat sentralistik tanpa pelibatan masyarakat secara bermakna, ketiadaan

mekanisme pendampingan berkelanjutan pascapenanaman, konflik kepemilikan dan akses lahan, serta tidak adanya insentif yang memadai bagi masyarakat untuk merawat tanaman.

Da Silva et al., (2025) melalui tinjauan global mereka menegaskan adanya keterkaitan yang kuat antara partisipasi komunitas dengan luaran ekologis dan sosial dalam upaya restorasi ekosistem. Partisipasi yang bermakna bukan sekadar keterlibatan yang bersifat simbolis sebagaimana diistilahkan Arnstein (1969), melainkan mencakup peran aktif mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Löfqvist et al., (2022) menekankan bahwa pertimbangan sosial secara langsung meningkatkan keadilan dan efektivitas restorasi ekosistem. Rasa memiliki yang belum mengakar dalam masyarakat terhadap tanaman rehabilitasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya keberlanjutan pemeliharaan pascapenanaman. Tedesco et al., (2021) menambahkan bahwa mekanisme insentif yang tepat, baik bersifat finansial maupun nonfinansial, merupakan kunci mempertahankan keterlibatan masyarakat dalam jangka panjang.

Maniraho et al., (2023) dalam kerangka konseptualnya menyatakan bahwa pendorong utama keberhasilan restorasi sosial-ekologis pada lanskap hutan mencakup tata kelola partisipatif, pemberdayaan komunitas, dan ketersediaan insentif ekonomi yang adil. Shelton et al., (2024) melalui tinjauan kritis perspektif sosial dalam restorasi hutan menemukan bahwa ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya dan pengambilan keputusan sering kali menjadi penghambat utama yang luput dari perhatian perancang program.

C. Peran Kelembagaan Lokal

North (1991) mendefinisikan kelembagaan sebagai seperangkat aturan formal dan informal yang membentuk pola interaksi manusia dalam masyarakat. Dalam konteks RHL, kelembagaan lokal mencakup kelompok tani, lembaga adat, pemerintah desa, serta norma-norma tidak tertulis yang mengatur pengelolaan sumber daya alam. Ostrom (1990) melalui teori pengelolaan sumber daya bersama (*common pool resources*) menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan sumber daya komunal sangat bergantung pada kapasitas kelembagaan lokal dalam tiga fungsi kritis, yakni penetapan aturan yang jelas, pemantauan kepatuhan, dan penegakan sanksi secara efektif.

Thapa et al., (2025) dalam tinjauan sistematisnya mengenai dinamika kelembagaan dalam restorasi hutan berbasis komunitas menemukan bahwa kelompok tani yang aktif, memiliki aturan kerja yang jelas, dan didukung koordinasi yang baik dengan pemerintah desa serta pendamping teknis menghasilkan tingkat keberhasilan yang secara nyata lebih tinggi. Höhl et al., (2020) mengidentifikasi bahwa kapasitas kelembagaan lokal menjadi salah satu variabel pembeda antara program restorasi yang berhasil dan yang gagal di berbagai negara tropis.

Sylviani et al., (2020) dalam studi tentang modal sosial dalam pengelolaan hutan tanaman rakyat di KPH Boalemo, Provinsi Gorontalo, menemukan bahwa modal sosial berupa kepercayaan, jaringan, dan norma timbal balik merupakan fondasi penting bagi

keberlanjutan pengelolaan hutan oleh masyarakat. Sinergi antara kelompok tani, pemerintah desa, dinas kehutanan, dan pendamping teknis menciptakan ekosistem dukungan yang diperlukan bagi keberlangsungan program D. Suparwata et al., (2021). Savari & Khaleghi, (2023) juga menegaskan bahwa modal sosial memiliki peran strategis dalam konservasi hutan karena dapat memperkuat tindakan kolektif dan menekan laju deforestasi. Herdiyanti et al., (2025) dalam konteks restorasi lahan pascatambang di Indonesia menemukan bahwa transformasi ekologis hanya dapat berlangsung secara berkelanjutan apabila ditopang oleh modal sosial yang kuat di tingkat komunitas.

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Momala, Kecamatan Batudaa Pantai, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, pada koordinat 0°31′49,29″ LU dan 122°51′44,34″ BT. Lokasi ini dipilih secara purposif mengingat statusnya sebagai salah satu desa pelaksana RHL vegetatif tahun 2019 dengan luas areal 330 hektar yang menunjukkan indikasi permasalahan sosial dan kelembagaan. Pengumpulan data lapangan dilaksanakan pada bulan Februari 2026.

B. Pendekatan dan Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah campuran (*mixed method*) dengan desain *concurrent triangulation*. Data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan secara bersamaan, dianalisis secara terpisah, kemudian hasilnya ditriangulasikan. Komponen kuantitatif terdiri atas dua instrumen: kuesioner Likert 4 poin tanpa opsi netral (27 item, 8 dimensi sosial) untuk 10 responden terpilih, dan kuesioner Likert 5 poin (15 item, 5 variabel kelembagaan) untuk 39 responden. Komponen kualitatif berupa wawancara mendalam dengan panduan empat pertanyaan terbuka.

C. Responden Penelitian

Responden dibagi ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama terdiri atas 10 responden untuk analisis faktor sosial yang dipilih secara purposive sampling berdasarkan keterlibatan langsung dalam program RHL, meliputi petani peserta, perangkat desa, dan ibu rumah tangga. Empat responden (R1–R4) mengisi kuesioner terstruktur secara lengkap, sementara enam responden (R5–R10) dianalisis melalui wawancara mendalam yang dikuantifikasikan menggunakan analisis isi. Kelompok kedua terdiri atas 39 responden untuk analisis faktor kelembagaan, mencakup 12 petani peserta RHL (30,77%), 12 aparat desa (30,77%), dan 15 pendamping lapangan (38,46%).

D. Instrumen dan Teknik Analisis Data

Instrumen kuesioner sosial memuat delapan dimensi pengukuran, yaitu: Partisipasi Masyarakat, Rasa Memiliki dan Komitmen, Kepercayaan dan Transparansi, Kelembagaan Lokal, Konflik dan Akses Lahan, Pendampingan dan Monitoring, Norma dan Praktik Sosial, serta Persepsi Ketidakberhasilan RHL. Item-item negatif diinversi agar skor tinggi konsisten menunjukkan kondisi sosial yang lebih kondusif. Analisis data dilakukan melalui lima tahapan terintegrasi: pengkodean jawaban kuesioner, perhitungan rerata skor per item dan per dimensi menggunakan statistik deskriptif, perhitungan indeks kelembagaan dengan formula Indeks = (Skor rata-rata / Skor

maksimum) × 100, analisis isi terhadap transkrip wawancara, dan triangulasi antarketiga sumber data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Faktor Sosial

Pengukuran aspek sosial dilakukan terhadap 10 responden yang mencakup delapan dimensi. Rerata skor keseluruhan mencapai 2,61, masuk dalam kategori Cukup Baik, namun terdapat variasi antardimensi yang cukup mencolok. Tabel 1 menyajikan rekapitulasi skor per dimensi sosial.

Tabel 1. Rekapitulasi Rerata Skor Per Dimensi Sosial

Dimensi Aspek Sosial	Skor R1–R4	Skor R5–R10	Rata-rata	Kategori
A. Partisipasi Masyarakat	3,17	3,11	3,13	Cukup Baik
B. Rasa Memiliki & Komitmen	2,88	2,33	2,55	Cukup Baik
C. Kepercayaan & Transparansi	3,00	3,00	3,00	Cukup Baik
D. Kelembagaan Lokal	3,00	2,75	2,85	Cukup Baik
E. Konflik & Akses Lahan	3,08	2,83	2,93	Cukup Baik
F. Pendampingan & Monitoring	2,81	2,04	2,38	Kurang Baik
G. Norma & Praktik Sosial	2,31	2,25	2,27	Kurang Baik
H. Persepsi Ketidakberhasilan	2,00	1,50	1,70	Kurang Baik
Skor Rata-rata Keseluruhan	**2,78**	**2,46**	**2,61**	**Cukup Baik**

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Dimensi partisipasi masyarakat memperoleh skor tertinggi (3,13; Cukup Baik). Seluruh responden menunjukkan bahwa masyarakat telah dilibatkan dalam perencanaan program melalui mekanisme musyawarah desa. Salah satu responden dengan pengalaman lima hingga sepuluh tahun menegaskan bahwa musyawarah selalu dilakukan sebelum kegiatan penanaman dan warga diberikan kesempatan mengusulkan jenis tanaman yang sesuai. Temuan ini sejalan dengan kajian Pakaya et al., (2025) yang menemukan bahwa keterlibatan masyarakat dalam perencanaan menjadi titik awal yang menentukan kelanjutan program pengelolaan DAS Bone di Gorontalo. Meskipun demikian, partisipasi tersebut tidak berlanjut hingga fase pemeliharaan, sehingga hanya menyentuh tahap awal sebagaimana dikritik oleh Arnstein (1969) sebagai partisipasi yang bersifat simbolis.

Dimensi rasa memiliki dan komitmen (skor 2,55; Cukup Baik) mengungkapkan adanya fragmentasi pandangan mengenai kepemilikan tanaman. Salah satu responden dari unsur perangkat desa menyatakan secara tegas bahwa tanaman hanya dianggap milik pemilik lahan, bukan milik bersama komunitas. Pandangan semacam ini melemahkan motivasi pemeliharaan secara gotong royong dan mencerminkan apa yang dalam literatur disebut sebagai mentalitas proyek, di mana masyarakat menganggap tanaman RHL sebagai tanggung jawab pihak penyelenggara program (Indrajaya et al., 2022). Kondisi serupa juga ditemukan dalam studi Ewane (2023) di Kamerun yang menunjukkan bahwa rendahnya rasa kepemilikan menjadi faktor penghambat utama keberhasilan penanaman pohon oleh komunitas.

Dimensi pendampingan dan monitoring merupakan dimensi dengan skor paling rendah (2,38; Kurang Baik) dan menjadi temuan paling kritis dalam penelitian ini. Mayoritas responden

menyatakan bahwa kegiatan pendampingan pascatanam sama sekali tidak ada atau sangat minim. Seorang responden dari unsur aparat desa menegaskan bahwa ketiadaan pendampingan menyebabkan banyak tanaman gagal tumbuh, sementara responden lain mengungkapkan harapan agar pendampingan dilakukan setidaknya setiap bulan. Pola ini mencerminkan kecenderungan umum program RHL di Indonesia, di mana pendampingan intensif hanya berlangsung pada fase penanaman yang menjadi tolok ukur pertanggungjawaban proyek, tetapi diabaikan pada fase pemeliharaan yang justru menentukan keberlanjutan tanaman (Gunawan et al., 2024).

Dimensi norma dan praktik sosial (skor 2,27; Kurang Baik) menunjukkan adanya hambatan kultural yang bersifat struktural. Dua praktik yang paling menonjol adalah pelepasan ternak secara bebas yang merusak tanaman muda dan kebiasaan pembersihan lahan dengan cara membakar. Keberadaan papan larangan pembakaran hutan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di lokasi penelitian mengonfirmasi bahwa persoalan ini bersifat nyata dan telah diakui oleh seluruh responden. Temuan ini selaras dengan kajian Salote et al., (2022) yang mengidentifikasi hubungan antara kondisi sosial ekonomi petani dengan tingkat degradasi lahan di DAS Alo Pohu, Gorontalo. Di sisi lain, dukungan tokoh adat dan agama dinilai membantu menjaga keberlangsungan program, sejalan dengan konsep aktualisasi tradisi Huyula sebagai semangat gotong royong dalam pengelolaan lahan kritis di Gorontalo (Suparwata et al., 2021).

Dimensi persepsi ketidakberhasilan RHL (skor 1,70; Kurang Baik) menunjukkan pengakuan yang kuat dari masyarakat bahwa pelaksanaan program belum berjalan optimal. Sebagian besar responden menyatakan persetujuan bahwa tanaman RHL tidak terpelihara dengan baik setelah penanaman, sehingga tingkat kematian tanaman tinggi. Masyarakat juga menyadari perlunya perubahan pendekatan dalam pelaksanaan RHL, khususnya yang menyangkut dimensi sosial dan keberlanjutan pengelolaan di tingkat tapak.

B. Analisis Faktor Kelembagaan

Analisis kelembagaan dilakukan terhadap 39 responden menggunakan lima variabel pengukuran. Indeks kelembagaan dihitung dengan formula Indeks = (Skor rata-rata / 5) × 100. Tabel 2 menyajikan hasil analisis indeks kelembagaan program RHL di Desa Momala.

Tabel 2. Analisis Indeks Kelembagaan Program RHL Desa Momala

Variabel Kelembagaan	Skor Rata-rata	Indeks (%)	Kategori	Implikasi
Sosialisasi Program	3,85	77	Cukup Baik	Dipertahankan
Partisipasi Masyarakat	3,40	68	Sedang	Ditingkatkan
Fungsi Kelompok Tani	3,10	62	Sedang	Penguatan segera
Koordinasi Antarlembaga	3,95	79	Cukup Baik	Dipertahankan
Monitoring Program	3,20	64	Sedang	Ditingkatkan

Sumber: Data Primer Diolah, 2026

Koordinasi antarlembaga menempati posisi tertinggi dengan indeks 79% (Cukup Baik), mengindikasikan bahwa hubungan kerja antara pemerintah desa, kelompok masyarakat, dan pendamping lapangan telah terjalin dengan cukup baik. Sosialisasi program juga memperoleh indeks yang relatif tinggi (77%), menandakan bahwa proses penyampaian informasi mengenai program kepada masyarakat berjalan efektif. Temuan ini sejalan dengan argumen D. Suparwata et

al., (2021) bahwa kolaborasi antara pemangku kebijakan dan komunitas pedesaan menjadi prasyarat keberhasilan strategi rehabilitasi.

Sisi lain, fungsi kelompok tani menunjukkan indeks paling rendah (62%; Sedang). Temuan ini memperkuat pandangan Ostrom (1990) bahwa kegagalan kelembagaan dalam menjalankan tiga fungsi kritis yakni menetapkan aturan, memantau kepatuhan, dan menegakkan sanksi mengakibatkan rendahnya komitmen anggota terhadap pemeliharaan tanaman pasca kegiatan. Pola serupa ditemukan Sylviani et al., (2020) di KPH Boalemo, di mana lemahnya modal sosial dalam kelompok tani berkorelasi dengan rendahnya keberlanjutan pengelolaan hutan tanaman rakyat. Monitoring program juga berada pada kategori Sedang (64%), yang mengonfirmasi bahwa sistem pemantauan pelaksanaan RHL masih perlu diperkuat secara signifikan.

C. Konvergensi Temuan Sosial dan Kelembagaan

Analisis komparatif antara temuan sosial dan kelembagaan memperlihatkan pola konvergensi yang saling memperkuat. Kelemahan pada dimensi pendampingan dan monitoring (skor sosial 2,38; Kurang Baik) berkorespondensi langsung dengan rendahnya indeks monitoring program (64%) dan indeks fungsi kelompok tani (62%). Konvergensi tersebut menunjukkan bahwa kelemahan pada aspek sosial dan kelembagaan tidak berdiri sendiri, melainkan saling menguatkan dalam menciptakan kondisi yang tidak mendukung keberhasilan RHL. Thapa et al., (2025) mengonfirmasi bahwa dinamika kelembagaan yang rapuh secara konsisten menghasilkan luaran ekologis dan sosial ekonomi yang rendah dalam program restorasi hutan berbasis komunitas.

Berdasarkan analisis menyeluruh, teridentifikasi empat faktor dominan yang menghambat keberhasilan RHL di Desa Momala. Pertama, lemahnya pendampingan dan monitoring pascatanam, sebagaimana dikonfirmasi oleh 60% responden sosial dan indeks monitoring kelembagaan 64%. Kedua, fungsi kelompok tani yang belum optimal sebagai penggerak pemeliharaan kolektif dengan indeks terendah 62%. Ketiga, masih berlangsungnya praktik sosial yang merusak berupa pelepasan ternak secara bebas dan pembakaran lahan. Keempat, preferensi ekonomi jangka pendek yang mengalihkan perhatian masyarakat dari kegiatan pemeliharaan tanaman rehabilitasi.

D. Penilaian Keseluruhan terhadap Keberhasilan RHL

Kondisi sosial dan kelembagaan di Desa Momala menunjukkan sifat dualistik. Dimensi yang berperan sebagai pendukung keberhasilan RHL meliputi partisipasi masyarakat dalam perencanaan awal (skor 3,13), kepercayaan dan transparansi (skor 3,00), kejelasan status lahan (skor 2,93), koordinasi antarlembaga (indeks 79%), dan sosialisasi program (indeks 77%). Sementara itu, dimensi yang menjadi penghambat mencakup pendampingan pascatanam yang sangat lemah (skor 2,38; indeks monitoring 64%), fungsi kelompok tani yang belum optimal (indeks 62%), norma dan praktik sosial yang merusak (skor 2,27), serta rasa memiliki yang belum mengakar (skor 2,55).

Dengan mempertimbangkan rerata skor keseluruhan aspek sosial sebesar 2,61 (Cukup Baik) yang disertai kenyataan bahwa dimensi-dimensi paling kritis berada di kategori Kurang Baik, serta mayoritas indeks kelembagaan berada pada kategori Sedang, hal ini mengindikasikan bahwa penguatan aspek sosial dan kelembagaan di Desa Momala masih menghadapi tantangan strategis untuk dapat mendukung keberhasilan RHL secara berkelanjutan. Capaian awal berupa partisipasi dan koordinasi yang relatif baik tidak mampu dipertahankan hingga fase pemeliharaan jangka panjang, sehingga investasi pada fase penanaman tidak menghasilkan dampak ekologis yang berkelanjutan. Temuan ini mengonfirmasi argumen Löhr et al., (2024) bahwa kesenjangan antara

kebijakan dan implementasi di tingkat lokal menjadi tantangan utama dalam keberhasilan restorasi lahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menghasilkan tiga kesimpulan utama. Pertama, kondisi sosial dan kelembagaan masyarakat Desa Momala menunjukkan karakteristik yang dinamis; di satu sisi, dimensi partisipasi awal, kepercayaan, koordinasi antarlembaga, dan sosialisasi program berada dalam kondisi yang relatif memadai. Namun di sisi lain, dimensi pendampingan dan monitoring pascatanam, fungsi kelompok tani, norma dan praktik sosial, serta konsistensi kelembagaan lokal masih memerlukan penguatan yang signifikan.

Kedua, faktor sosial dan kelembagaan yang menjadi tantangan utama dalam pencapaian keberhasilan RHL secara optimal meliputi: belum berjalannya pendampingan teknis pascatanam yang dikonfirmasi oleh minimal 60% responden sosial dan indeks monitoring kelembagaan sebesar 64%; peran kelompok tani yang belum berjalan maksimal dengan indeks terendah 62%; masih berlangsungnya praktik pelepasan ternak secara bebas dan pembakaran lahan; belum terbentuknya rasa memiliki yang mengakar terhadap tanaman rehabilitasi; serta kuatnya preferensi ekonomi jangka pendek di tingkat masyarakat.

Ketiga, secara keseluruhan aspek sosial dan kelembagaan di Desa Momala dinilai belum memberikan kontribusi yang optimal dalam mendukung keberhasilan jangka panjang program RHL. Capaian awal berupa partisipasi dan koordinasi yang relatif baik tidak dapat dipertahankan hingga fase pemeliharaan jangka panjang. Berdasarkan temuan tersebut, disarankan agar penguatan sistem pendampingan pascatanam dilakukan secara terjadwal, disertai revitalisasi kelembagaan kelompok tani melalui pelatihan manajemen organisasi, penertiban ternak dan penghentian praktik pembakaran lahan melalui regulasi desa, pembangunan rasa memiliki yang mengakar melalui mekanisme bagi-hasil yang transparan, serta integrasi kearifan lokal khususnya tradisi Huyula ke dalam desain program RHL.

REFERENSI

Arnstein, S. R. (1969). A Ladder Of Citizen Participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Bahua, M. I., & Suparwata, D. O. (2018). The level of society's participation in critical land rehabilitation in das Randangan Pohuwato Regency. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *122*(1). https://doi.org/10.1088/1755-1315/122/1/012139

Buthelezi, M., Lottering, R., Peerbhay, K., & Mutanga, O. (2025). Exploring forest rehabilitation and restoration: A brief systematic review. *Trees, Forests and People*. https://doi.org/10.1016/j.tfp.2025.100898

Da Silva, H. T., Ceccon, E., Henrique, P. M. T., Nogueira, D. T. S., & Baldauf, C. (2025). Association between ecological and social outcomes and their links to community participation in ecosystem restoration: a global review. *Restoration Ecology*, *33*. https://doi.org/10.1111/rec.70131

Ewane, E. B. (2023). Understanding Community Participation in Tree Planting and Management in Deforested Areas in Cameroon's Western Highlands. *Environmental Management*, *73*, 274–291. https://doi.org/10.1007/s00267-023-01902-0

Gunawan, R., Febryano, I. G., Bantara, I., & Yuwono, S. (2024). SOCIAL ENGINEERING IN THE IMPLEMENTATION OF FOREST AND LAND REHABILITATION IN GIRIMULYO VILLAGE,

LAMPUNG PROVINCE. *Jurnal Belantara*. https://doi.org/10.29303/jbl.v7i1.969

Herdiyanti, H., Suyanto, B., & Mas'udah, S. (2025). Social capital and ecological transformation in post-mining land restoration in Indonesia. *Ambio*, *55*, 433–449. https://doi.org/10.1007/s13280-025-02223-8

Höhl, M., Ahimbisibwe, V., Stanturf, J., Elsasser, P., Kleine, M., & Bolte, A. (2020). Forest Landscape Restoration—What Generates Failure and Success? *Forests*. https://doi.org/10.3390/f11090938

Indrajaya, Y., Yuwati, T., Lestari, S., Winarno, B., Narendra, B., Nugroho, H., Rachmanadi, D., Pratiwi, Turjaman, M., Adi, R., Savitri, E., Putra, P. B., Santosa, P., Nugroho, N., Cahyono, S., Wahyuningtyas, R. S., Prayudyaningsih, R., Halwany, W., Siarudin, M., … Mendham, D. (2022). Tropical Forest Landscape Restoration in Indonesia: A Review. *Land*. https://doi.org/10.3390/land11030328

Löfqvist, S., Kleinschroth, F., Bey, A., De Bremond, A., DeFries, R., Dong, J., Fleischman, F., Lele, S., Martin, D., Messerli, P., Meyfroidt, P., Pfeifer, M., Rakotonarivo, S., Ramankutty, N., Ramprasad, V., Rana, P., Rhemtulla, J., Ryan, C., Vieira, I., … Garrett, R. (2022). How Social Considerations Improve the Equity and Effectiveness of Ecosystem Restoration. *Bioscience*, *73*, 134–148. https://doi.org/10.1093/biosci/biac099

Löhr, K., Eshetu, S. B., Njoya, H. M., Hagan, J., Gebremedhin, A. T., Hounkpati, K., Raharinaivo, H., Ratsimba, H. R., Bekele, T., Adjonou, K., Kokou, K., & Sieber, S. (2024). Toward a social-ecological forest landscape restoration assessment framework: a review. *Discover Sustainability*, *5*. https://doi.org/10.1007/s43621-024-00342-y

Maniraho, L., Frietsch, M., Sieber, S., & Löhr, K. (2023). A framework for drivers fostering social-ecological restoration within forest landscape based on people's participation. A systematic literature review. *Discover Sustainability*, *4*. https://doi.org/10.1007/s43621-023-00141-x

North, D. C. (1991). Institutions. *Journal of Economic Perspectives*. *5*(1), 97–112. https://doi.org/10.1257/jep.5.1.97

Ostrom, E. (1990). *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9780511807763

Pakaya, P., Hasan, S., Syamsudin, S., Lihawa, F., & Dunggio, I. (2025). Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan DAS Bone, Provinsi Gorontalo. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Tanaman*. https://doi.org/10.55606/jurrit.v4i1.5165

Salote, M. K., Lihawa, F., & Dunggio, I. (2022). HUBUNGAN KONDISI SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT PETANI TERHADAP DEGRADASI LAHAN DI DAS ALO POHU PROVINSI GORONTALO. *JAMBURA GEO EDUCATION JOURNAL*. https://doi.org/10.34312/jgej.v3i2.14838

Savari, M., & Khaleghi, B. (2023). The role of social capital in forest conservation: An approach to deal with deforestation. *The Science of the Total Environment*, 165216. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.165216

Shelton, M., Kanowski, P., Kleinschmit, D., & Ison, R. (2024). Critical social perspectives in forest and landscape restoration – a systematic review. *Frontiers in Environmental Science*. https://doi.org/10.3389/fenvs.2024.1466758

Suparwata, D., Rukmana, D., Tenriawaru, A., & Neswati, R. (2021). Actualization of local community participation in critical land management in Gorontalo. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, *755*. https://doi.org/10.1088/1755-1315/755/1/012056

Sylviani, S., Suka, A., Surati, S., & Kurniasari, D. (2020). SOCIAL CAPITAL IN MANAGING COMMUNITY PLANTATION FOREST: A CASE STUDY AT KPH BOALEMO, GORONTALO PROVINCE. *Indonesian Journal of Forestry Research*. https://doi.org/10.20886/ijfr.2020.7.1.71-82

Tedesco, A., Brancalion, P., Hepburn, M. H., Walji, K., Wilson, K., Possingham, H., Dean, A., Nugent, N., Elias-Trostmann, K., Perez-Hammerle, K.-V., & Rhodes, J. (2021). The role of incentive mechanisms in promoting forest restoration. *Philosophical Transactions of the Royal Society B: Biological Sciences*, *378*. https://doi.org/10.1098/rstb.2021.0088

Thapa, M. S., Baral, S., & Chhetri, B. B. K. (2025). Institutional dynamics in community-based forest restoration: a systematic review on ecological and socio-economic outcomes. *Discover Sustainability*, *6*. https://doi.org/10.1007/s43621-025-02111-x